

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 212/PID.B/2011/PN.PINRANG)**



OLEH :

ANDI DEDY HERFIAWAN

B 111 09 473

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

Halaman Judul

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang)

OLEH :

ANDI DEDY HERFIAWAN

B 111 09 473

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI DEDY HERFIAWAN

B 111 09 473

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana program kekhususan Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. M.Said Karim,S.H.,M.H.
NIP. 19620711 1987031 001

Haeranah,S.H.,M.H
NIP. 131 961 576 19

A.n Dekan

Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 196304191989031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Dedy Herfiawan

Nomor Pokok : B 111 09 473

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

(Studi Kasus Putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir ujian program studi.

Makassar, 8 Februari 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. M. Said Karim ,S.H.,M.H.
NIP. 19620711 1987031 001

Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 131 961 576 19

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Dedy Herfiawan

Nomor Pokok : B 111 09 473

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

(Studi Kasus Putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir ujian program studi.

Makassar, 13 Februari 2012

A.n, Dekan
Wakil Dekan Bagian Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Andi Dedy Herfiawan (B 111 09 473) “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” (Studi Kasus Putusan Nomor : 212/PID.B/2011/PN.Pinrang). Dibimbing oleh Bapak M. Said Karim selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Penelitian dilaksanakan di Pinrang, yaitu Pengadilan Negeri Pinrang, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Di Putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5 (lima) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire Lagi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Lebih-Lebih Subsidaire Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut penulis, penerapan hukum materil dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan kehadiran Alla SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sekalipun penulis menyadari bahwa di dalamnya masih ada banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Dalam masa studi sampai hari ini, Penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah penulis lalui. Banyak cerita yang penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, terkadang lelah hadapi kehidupan di tanah orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada Penulis, akhirnya penulis dapat melalui itu semua dan tiba di hari ini dengan impian bahwa akan kembali ke tanah kelahiran dengan gelar S.H dibelakang nama penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua Penulis yang tidak pernah lelah membanting tulang mencari nafkah demi

membiayai studi Penulis. Apapun yang Penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapat begitu banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Birkah Latif, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.
5. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Staff Pengadilan Negeri Pinrang yang membantu Penulis selama masa penelitian.

7. Adik-adik penulis A. Vivin Herfiani dan A. Novi Herfianti.
8. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya DOKTRIN 09 yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu.
9. Keluarga Besar KKN Reguler Gel. 82 Posko Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
10. Teman-teman “KUPRET” kelas E, mulai dari Ardi, Mibar, Rheza, Anno, Adi, Ali, Mail, Zaldi, Diaz, Ilyas, Ilham, Panji, Fadil, Tonton, Anca, Ocha, Yusi, Iin, Teten, Cindy, Rara, Nining, Vita, Anni dan semua yang tak sempat penulis sebut.
11. Teman-teman Penulis di tanah kelahiran mulai dari Faisal, Amran, Arif, Asrul, Afdal, Adi, Odda, Ulfa, Qayyum, Inna dan Murni.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ke depannya Penulis bisa lebih baik lagi.

Wabbillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 8 Februari 2013

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tindak Pidana.....	7
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
B. Pembunuhan Berencana.....	15
C. Penyertaan (Deelneming).....	23
1. Pengertian Deelneming.....	23
2. Orang Yang Melakukan.....	26
3. Orang Yang Menyuruh Melakukan.....	29
4. Orang Yang Turut Serta Melakukan.....	37

5. Orang Yang Mengajukan.....	48
6. Orang Yang Membantu.....	50
D. Pidana dan Pemidanaan.....	52
1. Arti Pidana dan Pemidanaan.....	52
2. Jenis-jenis Pidana.....	54
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana..	54
1. Dasar Peniadaan Pidana.....	54
2. Dasar Pemberatan Pidana Umum.....	56
3. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya pidana Umum.....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Lokasi Penelitian.....	66
B. Jenis Dan Sumber Data.....	66
C. Jenis Penelitian.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
E. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang)	
1. Posisi Kasus.....	69
2. Dakwaan Jaksa.....	71
3. Tuntutan Jaksa.....	88

4. Amar Putusan.....	89
5. Analisis Penulis.....	91
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap	
Terdakwa Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama	
pada perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang.	
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap	
Terdakwa Tindak Pidana yang Dilakukan Secara	
Bersama-sama pada perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/	
PN.Pinrang.....	97
Analisis Penulis.....	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.

Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain diambil oper dalam perundang-undangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia.

Menurut Soedjono. D (Sudarsono: 1991:113),

“Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut para ahli dan teori tersebut di atas, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, demikian Subekti, adapun Van Apeldoorn (Sudarsono: 1991:114) menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam

tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang.

Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian.

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.

Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Atas dasar pemikiran inilah maka penulis menganggap bahwa perlunya kerja sama dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat. Ini pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang

Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang?

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah misalnya tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.

- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana.
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana, yang ditulis oleh M.H. Tirtaadmijaja.
- 5) Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana.
- 6) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda).

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Pengertian tindak pidana menurut Simons (Erdianto Effendi: 2011: 97) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Pompe (Erdianto Effendi: 2011: 97), tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- c. Van Hamel (Erdianto Effendi: 2011: 98) merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- d. Menurut E. Uthrecht (Erdianto Effendi: 2011: 98), tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Moeljatno (Erdianto Effendi: 2011: 98) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- f. Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi: 2011: 99) menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).
- g. Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi: 2005: 75), menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi: 2005: 79), unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna (Adami Chazawi: 2005: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers (Adami Chazawi: 2005: 81), unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);

- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk (Adami Chazawi: 2005: 81), merinci unsur-

unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Sementara itu, EY. Kanter dan SR. Sianturi (Erdianto Effendi: 2011:

99), menyatakan bahwa unsur- unsur tindak pidana meliputi:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya

berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau (Pasal 251 KUHP) pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.

Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang. Menurut Loebby Loqman (Erdianto Effendi: 2011: 99), terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama beserta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

B. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu.

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan

mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

“dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”

M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung: 2005: 31), mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut:

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hatisangat dekat dengan

pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan *moord* (murder) tetapi tidak mesti ada rencana.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK (Adami Chazawi: 2007: 85) menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. “*Opzet*”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang,
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya

unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan *moord* atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).

Contoh “seseorang menyuntikkan racun ke sebuah nenas, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana.

Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, karena kita adalah orang timur yang sangat menghormati orang tua. Melawan orang tua saja sudah dipandang sebagai perbuatan durhaka, apalagi membunuh dengan sengaja.

Dalam KUHP Federasi Rusia, delik pembunuhan dengan pemberatannya, diatur secara terperinci dan beberapa macam. Dikenal:

1. Pembunuhan dua atau lebih orang (di Indonesia dan Belanda berlaku aturan *concursum* atau gabungan tindak pidana dengan penambahan pidana dengan sepertiga).
2. Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalam aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas publik.
3. Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan tidak berdaya dan juga pembunuhan melalui penculikan atau untuk menahan sandera.
4. Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan hamil.
5. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam.
6. Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat berbahaya.
7. Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui persekongkolan atau kelompok terorganisasikan.
8. Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan menyewa, atau disertai dengan perampokan dengan kekerasan, pemerasan atau secara bandit.
9. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat jahat.
10. Pembunuhan yang dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan lain atau untuk memudahkan pelaksanaannya dan juga pembunuhan yang disertai dengan perkosaan atau tindakan seksual yang lain.

11. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan nasional, rasial, atau kebencian agama atau permusuhan darah.

12. Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh organ atau jaringan tubuh.

Oleh karena semua gejala pembunuhan kejam seperti ini terjadi juga di Indonesia, seperti pembunuhan yang diikuti mutilasi, maka perlu difikirkan, bahwa pemberatan pidana delik pembunuhan dirinci juga dalam KUHP baru. Untuk sementara perlu hal semacam ini dijadikan pedoman pemidanaan delik pembunuhan sebagai “hal-hal yang memberatkan pidana” dalam pertimbangan hakim..

C. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.

Hazewinkel-Suringa (Wirjono Prodjodikoro: 2009: 117), menceritakan bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja, dan baru pada penghabisan abad ke-18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan sampai di mana juga orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman.

Sehubungan dengan *deelneming* ini, Utrecht (Adami Chazawi: 2011: 71) mengatakan bahwa “pelajaran turut serta (*deelneming*) ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana itu. Biarpun mereka bukan pembuat-yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi”.

Dari keterangan di atas dapat diperoleh gambaran mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan penyertaan. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- *Deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu pertanggung jawaban dari peserta dihargai sendiri-sendiri;
- *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Tetapi KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya.

Deelneming diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi :

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk agar perbuatan itu dilakukan.
- (2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 berbunyi:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

- 1) Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 peranan pelaku yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*dader or pleger*) ;

- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- 3) Orang yang turut melakukan (*mededader* atau *medepleger*);
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlocker*);
- 5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Untuk memperjelas masing-masing dari kelima hal diatas maka akan dibahas satu persatu.

2. Orang Yang Melakukan Delik (*Dader* or *pleger*)

Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata pelaku yang artinya antara lain:

- 1) Orang yang melakukan suatu perbuatan;
- 2) Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya);
- 3) Orang yang melakukan suatu perbuatan.

Dalam bahasa Inggris pelaku disebut *doer*. Dengan demikian, terjemahan *dader* dengan pembuat adalah kurang tepat. Biasa juga disebut *pleger* atau pembuat pelaksana.

Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, pelaku dapat diketahui dari jenis delik yakni

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;

- b) Delik materiil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal (pelaku), tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Tetapi apabila ada orang lain yang ikut terlibat serta ke dalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, apakah syarat dari seorang *dader* harus juga menjadi syarat seorang *pleger*? Oleh karena syarat seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Jadi tampak dengan jelas bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran objektif. Jika demikian apa bedanya seorang *dader* dengan *pleger*. Perbedaan

pleger dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan seseorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk menunjukkan tindak pidana yang dituju.

Pembuat peserta tidaklah mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh, karena dalam hal pembuat penyuruh, pembuat materiilnya (*manus ministra*) adalah tidak dapat dipidana. Sedangkan pembuat peserta dipertanggungjawabkan dan diancam pidana yang sama dengan *dader* (pembuat tunggal), dan sama pula dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang disebut *mededader*.

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaannya ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, *plegernya* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Secara umum, demikian ukuran perbuatan seorang *pleger*. Tetapi dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana membuat atau

meneruskan suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran itu, tetapi ukuran lain. Dalam hal ini Hoge Raad (Adami Chazawi: 2011: 86) dalam suatu arrestnya (19-12-1910) meformulering bahwa orang yang menciptakan atau meneruskan keadaan terlarang itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah yang dipidana. Bahwa barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, maka dia berkewajiban untuk itu. Menurut Moeljatno (Adami Chazawi: 2011: 86), bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan terlarang, tetapi siapa yang berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan terlarang.

3. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut manus ministra yang oleh Satochid Kartanegara (Leden Marpaung: 2009: 77) disebut *onmiddellijk dader*. *Manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.

Di dalam mencari pengertian dan syarat *doenpleger* banyak ahli merujuk pada keterangan di dalam MvT MvS Belanda, yang menyatakan

bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
- b. Orang lain itu berbuat:
 - 1) Tanpa kesengajaan;
 - 2) Tanpa kealpaan;
 - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
 - a) Yang tidak diketahuinya;
 - b) Karena disesatkan;
 - c) Karena tunduk pada kekerasan.

Sebagai hal yang penting, dari apa yang diterangkan oleh MvT adalah bahwa jelas orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan, atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materiilnya tunduk pada kekerasan (objektif).

Berdasarkan keterangan MvT tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya-sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab. Walaupun sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materiilnya (orang yang disuruh melakukan) karena dia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Dari keterangan MvT itu dapatlah disimpulkan tentang pembuat penyuruh, pastilah dia orang yang menguasai orang lain, sebab orang lain itu adalah sebagai alat, orang inilah yang sesungguhnya yang mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan suatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena orang lain itu sebagai alat, maka dia-orang yang disuruh melakukan itu disebut *manus minstra*. Sedangkan pembuat penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut dengan *manus domina* yang dalam doktrin sering disebut dengan *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Bahwa tentang apa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis sebagai berikut.

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- b) Orang lain itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Mengenai hal ini telah ditegaskan sebab-sebabnya oleh MvT sebagaimana pada unsur-unsur pada huruf b. Pihak yang bertanggung jawab ada pada pembuat penyuruh (*manus domina*)
- c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

Sebagaimana telah disinggung diatas, dasar tidak dipidananya manus ministra terletak pada alasan subjektif dan alasan objektif pada diri pembuat materiil (*manus ministra*). Alasan objektif karena dia tunduk pada kekerasan, selebihnya adalah alasan subjektif.

- b. Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan

Perbuatan *manus ministra* pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan di dalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan.

Contoh karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu (*manus domina*) menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan 10 lembar uang yang diketahuinya palsu. Dia-pembantu adalah *manus ministra* dalam kejahatan mengedarkan uang palsu (245 KUHP). Dalam kejahatan mengedarkan uang palsu, terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu tidak mengetahui tentang palsunya uang yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan = opzettelijk).

Karena alasan tanpa kealpaan, contohnya seorang ibu membenci pada seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan di pekarangan rumahnya. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk membuat penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela, dan mengenai pemulung itu. Pada diri pembantu tidak ada unsur kelalaian, apabila telah diketahui selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada di bawah jendela, dan perbuatan seperti itu telah dilakukannya seringkali.

c. Karena tersesatkan

Apa yang dimaksudkan dengan tersesatkan di sini ialah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh orang lain (*in casu manus domina*) dengan cara-cara yang

isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan kepada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan tersebut.

Contohnya, ada seorang berkehendak untuk mencuri sebuah koper milik seorang penumpang kereta api. Sejak semula di stasiun, sebelum orang itu naik kereta, orang jahat itu telah menguntitnya dan kemudian ikut pula naik kereta. Ketika pemilik koper itu sedang tertidur lelap, di mana kereta api sedang berhenti pada suatu stasiun, orang jahat tadi menyuruh seorang kuli angkut untuk menurunkan koper itu dan membawanya ke sebuah taksi yang kemudian dipesan. Pada peristiwa ini terjadi pencurian koper, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kuli, melainkan kepada orang jahat yang *in casu* berkualitas sebagai pembuat penyuruh.

d. Karena kekerasan

Apa yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan kepada orang, yang mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal bentuk pembuat penyuruh, kekerasan ini datang dari pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan kepada fisik orang lain (*manus ministra*), sehingga orang yang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu

berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh. Contoh dua orang hendak merampok yang marah, karena tuan rumah tidak hendak memberitahu nomor kode pembuka brankas, bersama-sama melemparkan itu dari jendela rumah yang bertingkat, dan korban menimpa anak kecil yang sedang bermain di bawah dan mati. Atas matinya anak ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada tuan rumah, tetapi pada dua orang yang melemparkannya. Dalam kasus ini, tuan rumah adalah murni *manus ministra*, semata-mata alat dalam kekuasaan dua orang yang hendak merampok tadi, dan mereka adalah pembuat penyuruh.

Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkannya *manus ministra* (pembuat materiilnya) dalam bentuk menyuruh melakukan dan karenanya tidak boleh dipidana, tidaklah ada perbedaan pendapat. Pendapat umum tentang tidak dapat dipidananya *manus ministra* telah ada sejak tahun 1898, dan bahkan telah dianut dalam praktik hukum sebagaimana juga dalam arrest Hoge Raad (Adami Chazawi: 2011: 94) tanggal 7 juni 1898. Bagi kalangan ahli terdapat perbedaan pendapat hanyalah dari hal sebab apa yang tidak dapat dipidananya *manus ministra*. MvT mengatakan tidak dapat dipidananya itu karena dia berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan dan tanpa pertanggungjawaban (*zonder opzet, schuld of toerekenbaarheid*).

Mengenai syarat pembuat penyuruh dikatakan oleh Moeljatno (Adami Chazawi: 2011: 96), bahwa kemungkinan-kemungkinan tidak dipidanya orang yang disuruh adalah karena:

- a) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggung jawab;
- b) Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- c) Dalam keadaan daya paksa Pasal 48 KUHP;
- d) Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP;
- e) Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP.

Di antara sekian jenis tindak pidana, ada jenis tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana yang mensyaratkan kualitas pribadi tertentu pada pembuatnya, misalnya pada kejahatan jabatan (Bab XXVIII buku II), atau pada penggelapan yang dilakukan oleh wali, pengampu, atau wali (Pasal 375 KUHP). Pertanyaannya ialah apakah mungkin terjadi seorang yang tidak berkualitas demikian menyuruh lakukan pada orang berkualitas itu, misalnya bukan pegawai negeri menyuruh lakukan pada pegawai negeri untuk melakukan kejahatan jabatan? Atau apakah mungkin seorang bukan wali menyuruh gelapkan pada seorang wali atas benda-benda milik orang yang ada dibawah perwaliannya.

Mungkin terjadi, mengapa? Karena bentuk pembuat penyuruh itu adalah dia bukan pembuat tunggal (*dader*), tetapi tanggung jawabnya saja disamakan dengan pembuat tunggal, maka dia tidak harus memiliki

kualitas itu. Orang yang harus berkualitas itu adalah *dader* saja, bukan termasuk *doen pleger*.

Lain halnya dengan Van Hammel (Adami Chazawi: 2011: 98), beliau mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang yang bukan pegawai negeri menyuruh melakukan kejahatan jabatan pada seorang pegawai negeri, karena tidak mungkin menyuruh melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak dapat melakukan itu. Artinya dalam hal terjadinya bentuk pembuat penyuruh bisa terjadi jika orang yang menyuruh (*doen pleger*) itu adalah pegawai negeri.

4. Mereka Yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas. Oleh karena itu menimbulkan perbedaan pandangan.

Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang, A dan B mencuri sebuah televisi di sebuah kediaman, dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak

terkunci dan sama-sama pula mengangkat televisi tersebut kedalam mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya di pinggir jalan. Pada contoh ini perbuatan A dan perbuatan B sama-sama (bersama) mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatan yang sama dan tidak dapat mengangkat televisi hanya dengan satu orang. Jelas perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan pidana. Sama seperti perbuatan seorang pembuat (*dader*). Bedanya, ialah seorang *dader* dia sebagai pembuat tunggal.

Pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan Trapman (Adami Chazawi: 2011: 100) yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini condong pada pandangan objektif.

Pandangan ini tidak salah sepenuhnya, karena gambaran pembuat peserta seperti itu dalam kenyataannya bisa terjadi, sebagaimana contoh di atas. Pandangan ini sempit, benar tapi pembuat peserta tidak sesempit itu. Dengan syarat pembuatan yang harus sama seperti ini, menimbulkan masalah. Masalah itu ialah, karena perbuatannya sama, lalu siapakah diantara mereka itu sebagai pembuat pelaksananya? Sukar menentukannya. Biasanya lalu dijawab pembuat pelaksananya adalah orang yang satunya terhadap orang yang lainnya sebagai pembuat peserta, demikian juga sebaliknya orang yang lain ini adalah sebagai pembuat pelaksanaterhadap orang yang satunya sebagai pembuat

pesertanya. Jadi dengan demikian, seperti pada contoh diatas kualitas A ada dua, bisa berkualitas sebagai pembuat peserta dan juga bisa berkualitas sebagai pembuat pelaksana, tergantung dari mana memandangnya. Yang jelas mereka bukan pembuat tunggal (*dader*).

Sedangkan bagi pandangan luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta tidak harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.

Pandangan yang lebih luas ini mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit sebagaimana diterangkan di atas tadi. Dalam suatu arrest Hooge Raad (Adami Chazawi: 2011:101) tanggal 29-10-1934, dikenal dengan *hooi arrest*, yang telah jelas-jelas menganut pandangan luas, duduk perkaranya adalah sebagai berikut ini. Ada dua orang, A dan B sama-sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik C orang yang mereka benci. Pada waktu yang telah mereka sepakati, mereka berdua masuk kandang kuda itu. Di dalam kandang kuda, ada loteng dan disana ditempatkan rumput kering (*hooi*) untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang kuda itu, dilakukan dengan cara membakar rumput kering di atas loteng. Untuk pembakaran itu, A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng, sedangkan B memegang

tangga. Pada mulanya dengan sebuah korek api A mencoba membakar rumput, namun gagal, karena rumput di atas belum kering sepenuhnya. B lalu mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan pada A untuk maksud dapat dimulai dengan membakar daun-daun kering itu, namun juga tetap tidak dapat terbakar. Namun setelah beberapa kali menyulutkan korek pada rumput di loteng, akhirnya berhasil juga A membakar rumput kering itu, dan seterusnya api menjalar dan meluas sehingga terbakarlah seluruh kandang kuda milik C.

B di sidang pengadilan mengajukan pembelaan, bahwa dia bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda (pasal 187 KUHP), dia tidak melakukan tindak pidana pembakaran, karena perbuatannya sekedar memegang tangga yang perbuatan mana tidak memenuhi sebagai pembuat lengkap atau seorang dader. Dia adalah hanya membantu (pembuat pembantu). Hoge Raad mengenyampingkan alasan pembelaan B, dan menghukum B karena salahnya telah turut serta (pembuat peserta) melakukan pembakaran, sedangkan A adalah berkualitas sebagai pembuat pelaksananya.

Dalam konklusinya, Jaksa Agung Van Lier (Adami Chazawi: 2011: 102), menyatakan bahwa pembakaran itu tidak sama dengan membakar sesuatu. Pembakaran terdiri dari suatu kompleksitas perbuatan-perbuatan yang tidak sekedar berbuat menyalahkan korek api belaka. Hoge Raad (Adami Chazawi: 2011: 102) juga sejalan dengan pandangan Van Lier, dan berpendapat bahwa perbuatan memegang tangga dan tidak dari

tangannya menyalahkan api adalah juga telah melaksanakan sebagian dari unsur-unsur tindak pidana menimbulkan kebakaran (Pasal 187 KUHP). Karena antara A yang wujud perbuatannya membakar dengan B yang wujud perbuatannya memegang tangga terdapat kerja sama yang begitu eratny, sehingga menimbulkan kebakaran. Kerja sama yang erat ini terdapat dalam hal sebelumnya telah ada kesepakatan antara A dan B untuk secara bersama membakar kandang kuda milik C. Permufakatan untuk bekerja sama dalam melakukan pembakaran ini, sebagai indikator bahwa di sini ada kerja sama, yang menurut Hoge Raad disebut juga sebagai kerja sama yang di insyafi (*bewuste samenwerking*).

Hoge Raad dengan arrestnya ini telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subjektif daripada pendapat lama yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan objektif. Berdasarkan pandangan ini, maka dari hanya semata-mata dari sudut perbuatan (objektif), perbuatan pembuat peserta itu tidak boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu. Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanyalah dari sudut kesengajaan saja (sudut subjektif), kesengajaan pembuat pembantu hanya ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain, dia tidak mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat

pelaksananya. Sedangkan pada pembuat peserta kesengajaannya ditujukan pada penyelesaian tindak pidana, adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Kepentingan pembuat peserta terhadap terwujudnya tindak pidana adalah sama dengan kepentingan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Demikian pentingnya syarat kerja sama yang diinsyafi tersebut.

Hoge Raad (Adami Chazawi: 2011: 102) dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu:

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Kerja sama yang diinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan-suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam keinsyafan kerja sama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Dari sudut subjektif tidaklah dapat dibedakan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana. Perbedaan itu adalah nanti dapat dilihat pada saat pelaksanaan tindak pidana, seperti pada kasus pembakaran kandang kuda, di mana A wujud perbuatannya membakar, dan B yang wujud perbuatannya memegang tangga.

Kerja sama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan.

Tentang syarat kedua, bahwa mereka bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana, ini adalah syarat objektif yang ditetapkan oleh Hoge Raad. Dari syarat ini terkandung makna bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Perbuatan pembuat peserta sedikit atau banyak ada peranannya atau andilnya atau sumbangannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.

Pandangan Hoge Raad yang lebih condong pada ajaran subjektif dengan arrestnya tanggal 29 oktober 1934, telah diterima oleh kalangan ahli hukum dan demikian juga oleh praktik hukum di Belanda maupun di Hindia Belanda, dan kini Indonesia.

Praktik seperti Hoge Raad dalam hal bentuk pembuat peserta ini, diikuti juga oleh peradilan di Indonesia, seperti terdapat pada putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 8 November 1955 nomor 26/1955/PT, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “meskipun

terdakwa ke –II dalam suatu pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ke-I, hanya berada di luar rumah, namun terdakwa dianggap turut melakukan kejahatan, tidak hanya membantu, oleh karena niat untuk mencuri ke luar dari terdakwa ke-II dan dialah yang tahu tempat letaknya barang-barang yang dicuri dan lagi terdakwa ke-II turut mengangkat barang-barang yang dicuri, dari halaman depan tempat pencurian”.

Tampak betul dari sudut objektif, perbuatan pembuat peserta ini pada dasarnya seperti pembuat pembantu, ialah dia menjaga di luar rumah yang kemudian setelah benda objek kejahatan itu berada di luar, ia ikut mengangkat (membantu) juga ketika terdakwa I mengangkat atau membawa barang itu. Namun karena niat (yang sebenarnya lebih condong kepada pengertian inisiatif) datangnya justru dari terdakwa II, bukan dari terdakwa I, yang hal fakta inilah yang menjadi indikator bahwa kesengajaan terdakwa I ini adalah sama dengan kesengajaan terdakwa II (yang perbuatannya mengambil barang itu dari tempatnya yang semula di dalam rumah), ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Indikator yang disebutkan terakhir ini tidak terdapat pada bentuk pembuat pembantu. Inilah yang membedakan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu. Kesengajaan pembuat pembantu hanya ditujukan pada perbuatan yang mempermudah atau memperlancar bagi orang lain untuk mewujudkan tindak pidana, dan tidak ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana. Singkatnya perbedaan pembuat peserta dan

pembuat pembantu adalah hanya berbeda dari sudut batin (subjektif) dan tidak dapat dibedakan dari sudut wujud perbuatan (objektif).

Terus apa bedanya antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana? Dari sudut subjektif atau batin, tidak ada bedanya. Sebagaimana di atas telah diterangkan bahwa kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Kepentingan pembuat peserta adalah sama dengan kepentingan pembuat pelaksana dalam hal untuk terwujudnya tindak pidana. Seperti pada contoh A dan B sama-sama berkehendak untuk membunuh C, dan tidaklah mungkin ada pembuat peserta dalam hal apabila A berkehendak untuk membunuh C sedangkan B berkehendak untuk menganiaya C. untuk menentukan siapa di antara A dan B sebagai pembuat pelaksananya dan siapa pembuat pesertanya, dapat diketahui setelah mereka melaksanakan kejahatan itu. Siapa diantara A dan B mewujudkan perbuatan, di mana perbuatan itu yang menyebabkan matinya C, atau siapa yang perbuatannya yang terkuat menjadi penyebabnya kematian, dialah sebagai pembuat pelaksananya. Misalnya A mengampak kepala C dan pecah, sedang B memukul badan C dengan pentungan, maka dapat dipastikan pecahnya kepala itulah yang menyebabkan kematian, dan A adalah pelaku pelaksananya. Persoalannya bagaimana jika mereka sama-sama mengampak kepala, maka pada siapa yang mengampak pertamalah yang merupakan pembuat pelaksana, karena pada pengampak berikutnya oleh

temannya adalah berperan mempercepat kematian, dan bukan menentukan akibat kematian.

Hanya perlulah dipahami mengenai istilah pembuat materiil di sini, tidaklah harus sama artinya dengan *minus ministra* dalam bentuk menyuruh lakukan, yang tidak dapat dipidana. Pembuat materiil itu pada dasarnya adalah pembuat yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, atau dengan kata lain pembuat yang perbuatannya menyelesaikan tindak pidana. Pada tindak pidana materiil, pembuat materiilnya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat terlarang oleh undang-undang. Pada tindak pidana formil, pembuat materiilnya adalah orang yang perbuatannya mewujudkan perbuatan terlarang dalam tindak pidana. Dilihat dari sudut dapat-tidaknya dipidana, pembuat materiil itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pertama, pembuat materiil yang tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana ini terdapat *manus ministra* (orang yang disuruh melakukan); dan
- b. Kedua, pembuat materiil yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana-ialah sebagaimana pada pembuat pelaksana. Pembuat pelaksana ialah seorang pembuat materiil yang dipidana. Sedangkan *manus ministra* adalah pembuat materiil yang tidak boleh dipidana.

Jadi perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan

pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Ada perbedaan lain antara pembuat pelaksana dengan pembuat peserta, ialah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subjek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu, misalnya penggelapan oleh orang yang menguasai benda karena ada hubungan kerja (Pasal 374 KUHP). Dalam hal kejahatan seperti ini, pembuatnya pelaksananya haruslah orang yang memiliki kualitas itu, sedangkan pembuat peserta tidak diperlukan memiliki kualitas demikian. Alasannya, ialah karena bagi pembuat pelaksana haruslah orang yang dapat memenuhi semua unsur tindak pidana. Sedangkan bila kualitas itu ditentukan dalam rumusan, maka kualitas itu juga merupakan unsur tindak pidana. Bagi pelaku peserta, karena disyaratkan ikut serta dalam perbuatan pelaksanaannya saja, yang ini artinya dia tidak perlu dipandang mengenai apa kualitas pribadinya, yang penting adalah sikap batinnya dan wujud perbuatannya, jika sikap batinnya sama dengan pembuat pelaksana dan wujud perbuatannya adalah sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, maka dia sudah cukup syaratnya, dia adalah pembuat peserta.

5. Orang Yang Sengaja Membujuk/Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk / menganjurkan (pembuat penganjur disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnyalah: “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan”.

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur objektif, terdiri dari:

- a. Unsur perbuatan, ialah: menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
- b. Caranya, ialah:
 - Dengan memberikan sesuatu;
 - Dengan menjanjikan sesuatu;
 - Dengan menyalahgunakan kekuasaan;
 - Dengan menyalahgunakan martabat;

- Dengan kekerasan;
- Dengan ancaman;
- Dengan penyesatan;
- Dengan memberi kesempatan;
- Dengan memberikan sarana;
- Dengan memberikan kekurangan.

Unsur subjektif, yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah:

- a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu:
 - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
 - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
 - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
- c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa

yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur (adanya *pyschische causaliteit*).

- d. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya).
- e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

6. Orang Yang Membantu Melakukan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
 - 1. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
 - 2. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta,

orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitloekker*). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur. Berbeda dengan pertanggung jawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat [1]). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Dari keterangan di atas, sangatlah jelas perbedaan antara pembantuan dengan penyertaan. Dalam penyertaan para pelaku peserta

menyadari apa yang mereka lakukan dan mengambil bagian secara aktif dalam satu peristiwa pidana, sedangkan dalam pembantuan, partisipasi para pembantu bahkan kadang-kadang hanya sebatas memudahkan.

Banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana seseorang merasa tidak tahu bahwa mereka diajak melakukan sesuatu yang ternyata di kemudian hari diketahui sebagai tindak pidana. Contoh kasus adalah seseorang yang disuruh mengirimkan paket barang yang ternyata di dalamnya berisikan narkoba atau barang terlarang lainnya. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa si pembawa barang tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah narkoba maka ia dapat dibebaskan dari perkara. Tetapi hal demikian tidak berarti setiap orang dapat dengan mengelak dari dalih ketidaktahuan. Sebagai seorang yang cakap berbuat hukum, semestinya ia dapat mencurigai adanya kemungkinan yang dibawanya bukan merupakan barang yang halal.

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Arti pidana dan pemidanaan

Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. Menurut Prof. van Hamel (Lamintang : 2010 : 33), arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.

Di atas telah dibahas sedikit mengenai pidana, sekarang akan dibahas mengenai arti dari pembedaan. Menurut Prof Sudarto (Lamintang : 2010: 35), perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berkata:

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya,

yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2. Jenis –jenis pidana

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Pidana kurungan,
- d. Pidana denda,
- e. Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

1. Dasar Peniadaan Pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya.

Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat.

Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar peniadaan pidana ada dua macam, yaitu yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-undang. Adapun rincian dari pembedaannya adalah sebagai berikut :

a. Dasar Peniadaan Pidana dalam Undang-Undang

Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang terbagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, adapun pembagiannya:

- Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum diatur dalam Pasal 44 (tidak dapat dipertanggungjawabkan), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 (ayat (1) pembelaan terpaksa), Pasal 49 (ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas), Pasal 50 (menjalankan perintah jabatan yang sah), Pasal 51 (ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang), Pasal 51 (ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak

berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.

- Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat khusus tercantum dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, Pasal 221 ayat (2)

b. Dasar Peniadaan Pidana di luar Undang-Undang

Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang terbagi dua juga yaitu:

- Kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (secara materiil dalam fungsinya yang negatif)
- Dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan pada si pembuat.

2. Dasar Pemberatan Pidana Umum

a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

“bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:

- Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- Memakai kekuasaan jabatannya;
- Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga adalah seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada kejahatan-kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada pelanggaran dan kejahatan yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi: 2009: 74).

Jadi, pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di atas. Walaupun subjek tindak pidana Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan memperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu:

- Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang;
- Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

Tentang siapa atau dengan syarat-syarat apa yang dimaksud dengan pegawai negeri tidaklah dijelaskan lebih jauh dalam undang-undang. Pasal 92 KUHP tidaklah menerangkan tentang siapa pegawai negeri, tetapi sekedar menyebut tentang beberapa macamnya pegawai negeri, atau bolehlah dikatakan memperluas macamnya pegawai negeri, yaitu:

- Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- Semua anggota dewan subak (*waterschap*);
- Semua kepala rakyat Indonesia asli; dan
- Semua kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Dalam 2 (dua) undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdapat rumusan

tentang pengertian pegawai negeri dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat perluasan arti pegawai negeri yang lebih sempurna daripada Pasal 92 maupun pengertian menurut yurisprudensi.

Menurut UU No. 8 Tahun 1974, pegawai negeri adalah “mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan yang lebih sempurna dan lebih luas lagi adalah menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pada Pasal 1 butir ke-2 merumuskan sebagai berikut:

Pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negeri atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Walaupun kedua undang-undang di atas merumuskan mengenai pegawai negeri secara lebih sempurna, namun pengertian dan perluasan

arti pegawai negeri menurut kedua UU tersebut di atas tidak berlaku terhadap Pasal 52. Perihal pegawai negeri ini hanya berlaku sebagaimana pengertian menurut praktik hukum (yurisprudensi) dan perluasan arti menurut Pasal 92 saja.

b. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, yang bunyi lengkapnya adalah:

“bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara apapun yang penting kejahatan itu terwujud.

Oleh karena dalam Pasal 52a ini disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan maka di sini tidak berlaku pada pelanggaran. Di sini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP.

c. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (*Recidive*)

Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (social), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang

pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

- Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3) KUHP.

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir-butir di atas, tidak dapat terjadi pengulangan.

Oleh karena tidak mengenal *general recidive* inilah, maka pengaturannya tidak dimuat dalam Buku Pertama, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II dan pasal-pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun buku III (pelanggaran).

d. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Dasar pemberatan pidana yang telah dibicarakan di atas adalah bersifat umum, artinya berlaku untuk segala macam tindak pidana. Disamping dasar pemberatan pidana umum tersebut, undang-undang menyebut juga beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam beberapa pasal KUHP.

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

1. Dasar-dasar yang Menyebabkan diperingannya Pidana Umum

a. Menurut KUHP: Belum berumur 16 Tahun

Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentang hal

yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (diundangkan tanggal 3 Januari 1997 dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 1998), ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 67). Kini ini hanya penting dari segi sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak.

b. Menurut UU No. 3 Tahun 1997: Anak Yang Umurnya Telah Mencapai 8 Tahun Tetapi Belum 18 Tahun Dan Belum Pernah Kawin

Kini setelah Pasal 45, 46, dan 47 tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai dasar diperingannya pidana yang bersifat umum, digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Menurut UU ini dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dasar peringanan pidana menurut UU No.3 Tahun 1997, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama mengenai: umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun) dan yang kedua mengenai: belum pernah menikah. Dalam sistem hukum kita, selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang.

Sama dengan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 ini juga terhadap anak (KUHP: belum berumur 16 Tahun, Undang-Undang ini telah berumur 8 tahun tapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti

bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu di antara dua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 21).

c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan

Bagaimana dengan percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, yang menurut Undang-Undang (Pasal: 53 Ayat 2 dan 57 Ayat 1) pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataannya menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (*pleger*: pelaku pelaksana).

d. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar dalam pasal-pasal KUHP.

Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah

ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingannya atau pembedingnya itu ada 2, yaitu:

- Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar.
- Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok) tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Pinrang.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

C. Jenis Penelitian

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan catatan dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan

prilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan sesuatu yang nyata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang)

1. Posisi Kasus

Pada hari kamis tanggal 01 September 2011 pukul 18.00 Wita telah terjadi pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa I. Abraham alias Rahang dan terdakwa II. Ishak alias Haka terhadap korban A. Ardiansyah alias Ardi dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I. Abraham alias Rahang dan terdakwa II. Ishak alias Haka beserta teman-teman mereka makan bebek dan minum-minuman keras di rumah seorang temannya. Sepulang dari rumah temannya pukul 16.00 Wita, terdakwa I pulang ke rumahnya bersama temannya yang bernama Moha. Kemudian terdakwa I mengambil badik/pisau lalu diselipkan dipinggangnya lalu mengajak Moha menemui terdakwa II. Setelah bertemu terdakwa II, tersangka I lalu mengajaknya untuk mencari korban, kemudian terdakwa II masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang panjang yang kemudian diselipkan dipinggangnya. Setelah itu mereka berboncengan tiga menuju Ujung Tape karena mengira korban ada disana, di perjalanan inilah para terdakwa mengakui mau membalas dendam kepada korban karena sebelumnya terdakwa I pernah dipukul

sedangkan terdakwa II pernah diteriaki dan hampir ditabrak motor oleh korban sehingga terdakwa I dan terdakwa II berniat membalas dendam. Setelah sampai disana mereka bertemu dengan teman mereka yang bernama Mustakim, lalu beberapa saat kemudian lewatlah korban di depan para terdakwa. Terdakwa I lalu menunjuk korban sambil berkata kepada terdakwa II bahwa korban itu lah yang pernah memukulnya tetapi terdakwa II menjawab bahwa dia tidak mau bertengkar kalau di daerah situ. Lalu Moha pergi memakai motor Mustakim meninggalkan terdakwa I dan II, kemudian terdakwa I dan II serta Mustakim berboncengan tiga mengikuti korban. Kemudian korban dan terdakwa berpapasan di perbatasan Lisse-Langnga, korban yang melihat terdakwa langsung berbelok dan lari ke dalam empang yang kering. Melihat korban lari, terdakwa I dan terdakwa II juga ikut berlari mengejar korban sementara Mustakim menunggu di atas motornya dan beberapa saat kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Terdakwa I yang mengejar korban kemudian terjatuh lalu terdakwa II masih tetap mengejar korban. Korban yang dikejar tiba-tiba berhenti dan duduk karena kelelahan, disaat itulah terdakwa II datang menghampiri korban dan memarangi korban di bagian tangan sehingga badik yang dipegang korban terlempar. Kemudian korban berbalik mau mengambil badik miliknya tetapi tiba-tiba datang terdakwa I langsung menikam korban di bagian pinggang, dada dan perut. Setelah itu terdakwa II meletakkan parangnya di dekat korban dan pergi meninggalkan korban, lalu terdakwa I mengambil Parang tersebut dan

memakainya untuk memarangi leher dan punggung korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Dakwaan Jaksa

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam kasus ini ada lima dakwaan, yaitu:

1) Primair

Bahwa terdakwa I. ABRAHAM als RAHANG Bin AMBO TUO bersama-sama dengan terdakwa II. ISHAK als HAKA Bin SAPPEWALI, pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 18.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertepatan di empang tepatnya di Langnga-Lisse Kec. Mattirosompe Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap A. ARDIANSYAH als ARDI, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah Andika di Makuring Kec. Mattirosompe Pinrang terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha minum-minuman keras jenis Ballo dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa II. Ishak als haka pulang kerumahnya begitu pula terdakwa I. Abraham als rahang juga pulang dengan berboncengan dengan Moha untuk makan dan ketika selesai makan maka terdakwa I. Abraham als Rahang masuk kedalam kamarnya dan mengambil badik/pisau beserta sarungnya, kemudian badik/pisau tersebut diselipkan dipinggangnya dan sekitar pukul 16.30 WITA terdakwa I. Abraham als Rahang bersama Moha pergi ke rumah

terdakwa II. Ishak als Haka dan terdakwa I. Abraham als Rahang mengajak terdakwa II. Ishak als Haka untuk pergi ke Ujung Tape sambil berkata “kita kesana jangan sampai ada anak Kampung Beru disana (maksudnya Ardi (korban) berteman)”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka masuk kedalam rumahnya untuk mengambil parang panjang selanjutnya parang panjang tersebut diselipkan dipinggang terdakwa II. Ishak als Haka, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang berboncengan tiga dengan terdakwa II. Ishak als Haka dan Moha dan dalam perjalanan menuju Ujung Tape terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “saya mau balas dendam sama Ardi anak Kampung Beru”.

- Selanjutnya ketika terdakwa I. Abraham als Rahang dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha sampai di Ujung Tape bertemu dengan Mustakim dan sekitar 5 menit tiba-tiba lewat Ardi (korban) lalu terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “itumi yang sudah pukul saya, sudah ada”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka “saya tidak mau bertengkar kalau disini”, pada saat itu Moha pergi naik sepeda motor Mustakim dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban lewat lagi di depan terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim berboncengan tiga mengikuti korban yang menuju Langnga dan ketika tiba di perbatasan Lisse-Langnga, terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim bertemu dengan korban bertemu dengan korban yang berlari kearah terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim namun ketika korban melihat terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim maka korban langsung berbelok dan melompat ke pematang empang dan masuk ke dalam empang yang kering kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka langsung menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar korban masuk ke dalam empang kering sementara Mustakim menunggu di sepeda motornya dan pada saat terdakwa I. Abraham als Rahang maka terdakwa I. Abraham als Rahang terjatuh namun terdakwa II. Ishak als Haka tetap mengejar korban sambil menghunuskan parang panjangnya, sampai 100 meter di dalam empang korban berhenti dan duduk di dalam empang karena kelelahan lalu datang terdakwa II. Ishak als Haka sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus kemudian terdakwa II. Ishak als Haka berkata kepada korban “apakah kamu masih mau teriaki saya dan tabrak saya motor”, lalu korban berkata “berhenti maka”, namun terdakwa II. Ishak als Haka langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan kanan korban yang memegang sebilah badik sehingga badik tersebut terlempar kemudian korban

berbalik dengan maksud untuk mengambil badiknya namun tiba-tiba datang terdakwa I. Abraham als Rahang dan langsung menikam pinggang korban beberapa kali atau lebih dari satu kali dan terdakwa I. Abraham als Rahang juga menusuk dada dan perut korban beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjutnya terdakwa II. Ishak als Haka meletakkan parangnya di dekat kaki korban dan terdakwa dan terdakwa II. Ishak als Haka berlari pergi ke empang sebelah kanan namun terdakwa I. Abraham als Rahang mengambil parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut ke leher serta punggung korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan setelah itu terdakwa I. Abraham als Rahang berlari mengikuti terdakwa II. Ishak als Haka dan menyerahkan parang panjang tersebut sambil berkata “ini parangmu sudah saya pakai potong/tebas lehernya Ardi”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Abraham als Rahang serta terdakwa II. Ishak als Haka, maka A. Ardiansyah als Ardi mengalami luka-luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 06.445/MS/IX/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. A. Ery Nurnawaty, dokter pada puskesmas Mattombong kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, yang hasil pemeriksaan ditemukan:
 1. Orang tersebut ditemukan dalam keadaan mayat dialasi tikar plastic dan seprei bergaris putih warna pink memakai baju kaos warna hitam depan bergambar, rambut hitam ikal, bentuk muka oval memakai kawat gigi pada gigi bagian atas;
 2. Luka terbuka pada pelipis bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam enam koma lima centimeter;
 3. Luka terbuka pada dagu dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dan dalam tiga centimeter;
 4. Patah pada tulang rawan bawah;
 5. Luka terbuka pada leher sampai dagu bagian kanan tembus batang tenggorok dengan ukuran panjang lima belas koma lima centimeter, lebar empat centimeter dan dalam tujuh centimeter;
 6. Luka terbuka pada leher dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam dua centimeter;
 7. Luka terbuka pada leher bagian belakang dengan ukuran;
 - a. Panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;
 - b. Panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
 8. Luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
 9. Luka terbuka pada dada bagian kiri:

- a. Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
 - b. Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
10. Luka terbuka pada lengan kanan bagian luar dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter;
 11. Luka terbuka pada lengan kanan bagian dalam dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
 12. Luka terbuka pada punggung bagian kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
 13. Luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
 14. Luka terbuka pada pinggang bagian belakang dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
 15. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma tujuh centimeter;
 16. Luka terbuka pada paha kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam satu centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan mayat tersebut di atas luka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2) Subsidair

Bahwa terdakwa I. ABRAHAM als RAHANG Bin AMBO TUO bersama-sama dengan terdakwa II. ISHAK als HAKA Bin SAPPEWALI, pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 18.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertepatan di empang tepatnya di Langnga-Lisse Kec. Mattirosompe Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap A. ARDIANSYAH als ARDI, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumah Andika di Makuring Kec. Mattirosompe Pinrang terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha minum-minuman keras jenis Ballo dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa II. Ishak als haka pulang kerumahnya begitu pula terdakwa I. Abraham als rahang juga pulang dengan berboncengan dengan Moha untuk makan dan ketika selesai makan maka terdakwa I. Abraham als Rahang masuk kedalam kamarnya dan mengambil badik/pisau beserta sarungnya, kemudian badik/pisau tersebut diselipkan dipinggangnya dan sekitar pukul 16.30 WITA terdakwa I. Abraham als Rahang bersama Moha pergi ke rumah terdakwa II. Ishak als Haka dan terdakwa I. Abraham als Rahang mengajak terdakwa II. Ishak als Haka untuk pergi ke Ujung Tape sambil berkata “kita kesana jangan sampai ada anak Kampung Beru disana (maksudnya Ardi (korban) berteman)”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka masuk kedalam rumahnya untuk mengambil parang panjang selanjutnya parang panjang tersebut diselipkan dipinggang terdakwa II. Ishak als Haka, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang berboncengan tiga dengan terdakwa II. Ishak als Haka dan Moha dan dalam perjalanan menuju Ujung Tape terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “saya mau balas dendam sama Ardi anak Kampung Beru”.
- Selanjutnya ketika terdakwa I. Abraham als Rahang dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha sampai di Ujung Tape bertemu dengan Mustakim dan sekitar 5 menit tiba-tiba lewat Ardi (korban) lalu terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “itumi yang sudah pukul saya, sudah ada”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka “saya tidak mau bertengkar kalau disini”, pada saat itu Moha pergi naik sepeda motor Mustakim dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban lewat lagi di depan terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim berboncengan tiga mengikuti korban yang menuju Langnga dan ketika tiba di perbatasan Lisse-Langnga, terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak

als Haka serta Mustakim bertemu dengan korban bertemu dengan korban yang berlari ke arah terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim namun ketika korban melihat terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim maka korban langsung berbelok dan melompat ke pematang empang dan masuk ke dalam empang yang kering kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka langsung menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar korban masuk ke dalam empang kering sementara Mustakim menunggu di sepeda motornya dan pada saat terdakwa I. Abraham als Rahang maka terdakwa I. Abraham als Rahang terjatuh namun terdakwa II. Ishak als Haka tetap mengejar korban sambil menghunuskan parang panjangnya, sampai 100 meter di dalam empang korban berhenti dan duduk di dalam empang karena kelelahan lalu datang terdakwa II. Ishak als Haka sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus kemudian terdakwa II. Ishak als Haka berkata kepada korban “apakah kamu masih mau teriaki saya dan tabrak saya motor”, lalu korban berkata “berhenti maka”, namun terdakwa II. Ishak als Haka langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan kanan korban yang memegang sebilah badik sehingga badik tersebut terlempar kemudian korban berbalik dengan maksud untuk mengambil badiknya namun tiba-tiba datang terdakwa I. Abraham als Rahang dan langsung menikam pinggang korban beberapa kali atau lebih dari satu kali dan terdakwa I. Abraham als Rahang juga menusuk dada dan perut korban beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjutnya terdakwa II. Ishak als Haka meletakkan parangnya di dekat kaki korban dan terdakwa dan terdakwa II. Ishak als Haka berlari pergi ke empang sebelah kanan namun terdakwa I. Abraham als Rahang mengambil parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut ke leher serta punggung korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan setelah itu terdakwa I. Abraham als Rahang berlari mengikuti terdakwa II. Ishak als Haka dan menyerahkan parang panjang tersebut sambil berkata “ini parangmu sudah saya pakai potong/tebas lehernya Ardi”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Abraham als Rahang serta terdakwa II. Ishak als Haka, maka A. Ardiansyah als Ardi mengalami luka-luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 06.445/MS/IX/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. A. Ery Nurnawaty, dokter pada puskesmas Mattombong kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, yang hasil pemeriksaan ditemukan:
 1. Orang tersebut ditemukan dalam keadaan mayat dialasi tikar plastic dan seprei bergaris putih warna pink memakai baju kaos

warna hitam depan bergambar, rambut hitam ikal, bentuk muka oval memakai kawat gigi pada gigi bagian atas;

2. Luka terbuka pada pelipis bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam enam koma lima centimeter;
3. Luka terbuka pada dagu dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dan dalam tiga centimeter;
4. Patah pada tulang rawan bawah;
5. Luka terbuka pada leher sampai dagu bagian kanan tembus batang tenggorok dengan ukuran panjang lima belas koma lima centimeter, lebar empat centimeter dan dalam tujuh centimeter;
6. Luka terbuka pada leher dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam dua centimeter;
7. Luka terbuka pada leher bagian belakang dengan ukuran;
 - c. Panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;
 - d. Panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
8. Luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
9. Luka terbuka pada dada bagian kiri:
 - c. Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
 - d. Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
10. Luka terbuka pada lengan kanan bagian luar dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter;
11. Luka terbuka pada lengan kanan bagian dalam dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
12. Luka terbuka pada punggung bagian kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
13. Luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
14. Luka terbuka pada pinggang bagian belakang dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
15. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma tujuh centimeter;
16. Luka terbuka pada paha kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam satu centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan mayat tersebut di atas luka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

3) Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa I. ABRAHAM als RAHANG Bin AMBO TUO bersama-sama dengan terdakwa II. ISHAK als HAKA Bin SAPPEWALI, pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 18.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di empang tepatnya di Langnga-Lisse Kec. Mattirosompe Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap A. ARDIANSYAH als ARDI, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah Andika di Makuring Kec. Mattirosompe Pinrang terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha minum-minuman keras jenis Ballo dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa II. Ishak als haka pulang kerumahnya begitu pula terdakwa I. Abraham als rahang juga pulang dengan berboncengan dengan Moha untuk makan dan ketika selesai makan maka terdakwa I. Abraham als Rahang masuk kedalam kamarnya dan mengambil badik/pisau beserta sarungnya, kemudian badik/pisau tersebut diselipkan dipinggangnya dan sekitar pukul 16.30 WITA terdakwa I. Abraham als Rahang bersama Moha pergi ke rumah terdakwa II. Ishak als Haka dan terdakwa I. Abraham als Rahang mengajak terdakwa II. Ishak als Haka untuk pergi ke Ujung Tape

sambil berkata “kita kesana jangan sampai ada anak Kampung Beru disana (maksudnya Ardi (korban) berteman)”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka masuk kedalam rumahnya untuk mengambil parang panjang selanjutnya parang panjang tersebut diselipkan dipinggang terdakwa II. Ishak als Haka, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang berboncengan tiga dengan terdakwa II. Ishak als Haka dan Moha dan dalam perjalanan menuju Ujung Tape terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “saya mau balas dendam sama Ardi anak Kampung Beru”.

- Selanjutnya ketika terdakwa I. Abraham als Rahang dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha sampai di Ujung Tape bertemu dengan Mustakim dan sekitar 5 menit tiba-tiba lewat Ardi (korban) lalu terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “itumi yang sudah pukul saya, sudah ada”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka “saya tidak mau bertengkar kalau disini”, pada saat itu Moha pergi naik sepeda motor Mustakim dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban lewat lagi di depan terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim berboncengan tiga mengikuti korban yang menuju Langnga dan ketika tiba di perbatasan Lisse-Langnga, terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim bertemu dengan korban bertemu dengan korban yang berlari kearah terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim namun ketika korban melihat terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim maka korban langsung berbelok dan melompat ke pematang empang dan masuk ke dalam empang yang kering kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka langsung menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar korban masuk ke dalam empang kering sementara Mustakim menunggu di sepeda motornya dan pada saat terdakwa I. Abraham als Rahang maka terdakwa I. Abraham als Rahang terjatuh namun terdakwa II. Ishak als Haka tetap mengejar korban sambil menghunuskan parang panjangnya, sampai 100 meter di dalam empang korban berhenti dan duduk di dalam empang karena kelelahan lalu datang terdakwa II. Ishak als Haka sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus kemudian terdakwa II. Ishak als Haka berkata kepada korban “apakah kamu masih mau teriaki saya dan tabrak saya motor”, lalu korban berkata “berhenti maka”, namun terdakwa II. Ishak als Haka langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan kanan korban yang memegang sebilah badik sehingga badik tersebut terlempar kemudian korban berbalik dengan maksud untuk mengambil badiknya namun tiba-tiba datang terdakwa I. Abraham als Rahang dan langsung

menikam pinggang korban beberapa kali atau lebih dari satu kali dan terdakwa I. Abraham als Rahang juga menusuk dada dan perut korban beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjutnya terdakwa II. Ishak als Haka meletakkan parangnya di dekat kaki korban dan terdakwa dan terdakwa II. Ishak als Haka berlari pergi ke empang sebelah kanan namun terdakwa I. Abraham als Rahang mengambil parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut ke leher serta punggung korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan setelah itu terdakwa I. Abraham als Rahang berlari mengikuti terdakwa II. Ishak als Haka dan menyerahkan parang panjang tersebut sambil berkata “ini parangmu sudah saya pakai potong/tebas lehernya Ardi”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Abraham als Rahang serta terdakwa II. Ishak als Haka, maka A. Ardiansyah als Ardi mengalami luka-luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 06.445/MS/IX/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. A. Ery Nurnawaty, dokter pada puskesmas Mattombong kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, yang hasil pemeriksaan ditemukan:
 1. Orang tersebut ditemukan dalam keadaan mayat dialasi tikar plastic dan seprei bergaris putih warna pink memakai baju kaos warna hitam depan bergambar, rambut hitam ikal, bentuk muka oval memakai kawat gigi pada gigi bagian atas;
 2. Luka terbuka pada pelipis bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam enam koma lima centimeter;
 3. Luka terbuka pada dagu dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dan dalam tiga centimeter;
 4. Patah pada tulang rawan bawah;
 5. Luka terbuka pada leher sampai dagu bagian kanan tembus batang tenggorok dengan ukuran panjang lima belas koma lima centimeter, lebar empat centimeter dan dalam tujuh centimeter;
 6. Luka terbuka pada leher dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam dua centimeter;
 7. Luka terbuka pada leher bagian belakang dengan ukuran;
 - e. Panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;
 - f. Panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
 8. Luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
 9. Luka terbuka pada dada bagian kiri:
 - e. Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;

- f. Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
- 10. Luka terbuka pada lengan kanan bagian luar dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter;
- 11. Luka terbuka pada lengan kanan bagian dalam dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
- 12. Luka terbuka pada punggung bagian kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
- 13. Luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
- 14. Luka terbuka pada pinggang bagian belakang dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
- 15. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma tujuh centimeter;
- 16. Luka terbuka pada paha kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam satu centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan mayat tersebut di atas luka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

4) Lebih Subsidair lagi

Bahwa terdakwa I. ABRAHAM als RAHANG Bin AMBO TUO bersama-sama dengan terdakwa II. ISHAK als HAKA Bin SAPPEWALI, pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 18.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertepatan di empang tepatnya di Langnga-Lisse Kec. Mattirosompe Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap A. ARDIANSYAH als ARDI, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumah Andika di Makuring Kec. Mattirosompe Pinrang terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha minum-minuman keras jenis Ballo dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa II. Ishak als haka pulang kerumahnya begitu pula terdakwa I. Abraham als rahang juga pulang dengan berboncengan dengan Moha untuk makan dan ketika selesai makan maka terdakwa I. Abraham als Rahang masuk kedalam kamarnya dan mengambil badik/pisau beserta sarungnya, kemudian badik/pisau tersebut diselipkan dipinggangnya dan sekitar pukul 16.30 WITA terdakwa I. Abraham als Rahang bersama Moha pergi ke rumah terdakwa II. Ishak als Haka dan terdakwa I. Abraham als Rahang mengajak terdakwa II. Ishak als Haka untuk pergi ke Ujung Tape sambil berkata “kita kesana jangan sampai ada anak Kampung Beru disana (maksudnya Ardi (korban) berteman)”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka masuk kedalam rumahnya untuk mengambil parang panjang selanjutnya parang panjang tersebut diselipkan dipinggang terdakwa II. Ishak als Haka, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang berboncengan tiga dengan terdakwa II. Ishak als Haka dan Moha dan dalam perjalanan menuju Ujung Tape terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “saya mau balas dendam sama Ardi anak Kampung Beru”.
- Selanjutnya ketika terdakwa I. Abraham als Rahang dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha sampai di Ujung Tape bertemu dengan Mustakim dan sekitar 5 menit tiba-tiba lewat Ardi (korban) lalu terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “itumi yang sudah pukul saya, sudah ada”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka “saya tidak mau bertengkar kalau disini”, pada saat itu Moha pergi naik sepeda motor Mustakim dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban lewat lagi di depan terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim berboncengan tiga mengikuti korban yang menuju Langnga dan ketika tiba di perbatasan Lisse-Langnga, terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak

als Haka serta Mustakim bertemu dengan korban bertemu dengan korban yang berlari ke arah terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim namun ketika korban melihat terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim maka korban langsung berbelok dan melompat ke pematang empang dan masuk ke dalam empang yang kering kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka langsung menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar korban masuk ke dalam empang kering sementara Mustakim menunggu di sepeda motornya dan pada saat terdakwa I. Abraham als Rahang maka terdakwa I. Abraham als Rahang terjatuh namun terdakwa II. Ishak als Haka tetap mengejar korban sambil menghunuskan parang panjangnya, sampai 100 meter di dalam empang korban berhenti dan duduk di dalam empang karena kelelahan lalu datang terdakwa II. Ishak als Haka sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus kemudian terdakwa II. Ishak als Haka berkata kepada korban “apakah kamu masih mau teriaki saya dan tabrak saya motor”, lalu korban berkata “berhenti maka”, namun terdakwa II. Ishak als Haka langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan kanan korban yang memegang sebilah badik sehingga badik tersebut terlempar kemudian korban berbalik dengan maksud untuk mengambil badiknya namun tiba-tiba datang terdakwa I. Abraham als Rahang dan langsung menikam pinggang korban beberapa kali atau lebih dari satu kali dan terdakwa I. Abraham als Rahang juga menusuk dada dan perut korban beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjutnya terdakwa II. Ishak als Haka meletakkan parangnya di dekat kaki korban dan terdakwa dan terdakwa II. Ishak als Haka berlari pergi ke empang sebelah kanan namun terdakwa I. Abraham als Rahang mengambil parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut ke leher serta punggung korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan setelah itu terdakwa I. Abraham als Rahang berlari mengikuti terdakwa II. Ishak als Haka dan menyerahkan parang panjang tersebut sambil berkata “ini parangmu sudah saya pakai potong/tebas lehernya Ardi”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Abraham als Rahang serta terdakwa II. Ishak als Haka, maka A. Ardiansyah als Ardi mengalami luka-luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 06.445/MS/IX/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. A. Ery Nurnawaty, dokter pada puskesmas Mattombong kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, yang hasil pemeriksaan ditemukan:
 1. Orang tersebut ditemukan dalam keadaan mayat dialasi tikar plastic dan seprei bergaris putih warna pink memakai baju kaos

warna hitam depan bergambar, rambut hitam ikal, bentuk muka oval memakai kawat gigi pada gigi bagian atas;

2. Luka terbuka pada pelipis bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam enam koma lima centimeter;
3. Luka terbuka pada dagu dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dan dalam tiga centimeter;
4. Patah pada tulang rawan bawah;
5. Luka terbuka pada leher sampai dagu bagian kanan tembus batang tenggorok dengan ukuran panjang lima belas koma lima centimeter, lebar empat centimeter dan dalam tujuh centimeter;
6. Luka terbuka pada leher dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam dua centimeter;
7. Luka terbuka pada leher bagian belakang dengan ukuran;
 - g. Panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;
 - h. Panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
8. Luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
9. Luka terbuka pada dada bagian kiri:
 - g. Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
 - h. Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
10. Luka terbuka pada lengan kanan bagian luar dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter;
11. Luka terbuka pada lengan kanan bagian dalam dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
12. Luka terbuka pada punggung bagian kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
13. Luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
14. Luka terbuka pada pinggang bagian belakang dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
15. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma tujuh centimeter;
16. Luka terbuka pada paha kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam satu centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan mayat tersebut di atas luka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

5) Lebih-Lebih Subsidair Lagi

Bahwa terdakwa I. ABRAHAM als RAHANG Bin AMBO TUO bersama-sama dengan terdakwa II. ISHAK als HAKA Bin SAPPEWALI, pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 18.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di empang tepatnya di Langnga-Lisse Kec. Mattirosompe Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap A. ARDIANSYAH als ARDI, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah Andika di Makuring Kec. Mattirosompe Pinrang terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha minum-minuman keras jenis Ballo dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa II. Ishak als haka pulang kerumahnya begitu pula terdakwa I. Abraham als rahang juga pulang dengan berboncengan dengan Moha untuk makan dan ketika selesai makan maka terdakwa I. Abraham als Rahang masuk kedalam kamarnya dan mengambil badik/pisau beserta sarungnya, kemudian badik/pisau tersebut diselipkan dipinggangnya dan sekitar pukul 16.30 WITA terdakwa I. Abraham als Rahang bersama Moha pergi ke rumah terdakwa II. Ishak als Haka dan terdakwa I. Abraham als Rahang mengajak terdakwa II. Ishak als Haka untuk pergi ke Ujung Tape

sambil berkata “kita kesana jangan sampai ada anak Kampung Beru disana (maksudnya Ardi (korban) berteman)”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka masuk kedalam rumahnya untuk mengambil parang panjang selanjutnya parang panjang tersebut diselipkan dipinggang terdakwa II. Ishak als Haka, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang berboncengan tiga dengan terdakwa II. Ishak als Haka dan Moha dan dalam perjalanan menuju Ujung Tape terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “saya mau balas dendam sama Ardi anak Kampung Beru”.

- Selanjutnya ketika terdakwa I. Abraham als Rahang dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha sampai di Ujung Tape bertemu dengan Mustakim dan sekitar 5 menit tiba-tiba lewat Ardi (korban) lalu terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “itumi yang sudah pukul saya, sudah ada”, kemudian terdakwa II. Ishak als Haka “saya tidak mau bertengkar kalau disini”, pada saat itu Moha pergi naik sepeda motor Mustakim dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban lewat lagi di depan terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim berboncengan tiga mengikuti korban yang menuju Langnga dan ketika tiba di perbatasan Lisse-Langnga, terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim bertemu dengan korban bertemu dengan korban yang berlari kearah terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim namun ketika korban melihat terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim maka korban langsung berbelok dan melompat ke pematang empang dan masuk ke dalam empang yang kering kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka langsung menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar korban masuk ke dalam empang kering sementara Mustakim menunggu di sepeda motornya dan pada saat terdakwa I. Abraham als Rahang maka terdakwa I. Abraham als Rahang terjatuh namun terdakwa II. Ishak als Haka tetap mengejar korban sambil menghunuskan parang panjangnya, sampai 100 meter di dalam empang korban berhenti dan duduk di dalam empang karena kelelahan lalu datang terdakwa II. Ishak als Haka sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus kemudian terdakwa II. Ishak als Haka berkata kepada korban “apakah kamu masih mau teriaki saya dan tabrak saya motor”, lalu korban berkata “berhenti maka”, namun terdakwa II. Ishak als Haka langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan kanan korban yang memegang sebilah badik sehingga badik tersebut terlempar kemudian korban berbalik dengan maksud untuk mengambil badiknya namun tiba-tiba datang terdakwa I. Abraham als Rahang dan langsung

menikam pinggang korban beberapa kali atau lebih dari satu kali dan terdakwa I. Abraham als Rahang juga menusuk dada dan perut korban beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjutnya terdakwa II. Ishak als Haka meletakkan parangnya di dekat kaki korban dan terdakwa dan terdakwa II. Ishak als Haka berlari pergi ke empang sebelah kanan namun terdakwa I. Abraham als Rahang mengambil parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut ke leher serta punggung korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan setelah itu terdakwa I. Abraham als Rahang berlari mengikuti terdakwa II. Ishak als Haka dan menyerahkan parang panjang tersebut sambil berkata “ini parangmu sudah saya pakai potong/tebas lehernya Ardi”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Abraham als Rahang serta terdakwa II. Ishak als Haka, maka A. Ardiansyah als Ardi mengalami luka-luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 06.445/MS/IX/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. A. Ery Nurnawaty, dokter pada puskesmas Mattombong kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, yang hasil pemeriksaan ditemukan:
- 6) Orang tersebut ditemukan dalam keadaan mayat dialasi tikar plastic dan seprei bergaris putih warna pink memakai baju kaos warna hitam depan bergambar, rambut hitam ikal, bentuk muka oval memakai kawat gigi pada gigi bagian atas;
- 7) Luka terbuka pada pelipis bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam enam koma lima centimeter;
- 8) Luka terbuka pada dagu dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dan dalam tiga centimeter;
- 9) Patah pada tulang rawan bawah;
- 10) Luka terbuka pada leher sampai dagu bagian kanan tembus batang tenggorok dengan ukuran panjang lima belas koma lima centimeter, lebar empat centimeter dan dalam tujuh centimeter;
- 11) Luka terbuka pada leher dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam dua centimeter;
- 12) Luka terbuka pada leher bagian belakang dengan ukuran;
 - i. Panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter;
 - j. Panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
- 13) Luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- 14) Luka terbuka pada dada bagian kiri:
 - i. Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
 - j. Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;

- 15) Luka terbuka pada lengan kanan bagian luar dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter;
- 16) Luka terbuka pada lengan kanan bagian dalam dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
- 17) Luka terbuka pada punggung bagian kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
- 18) Luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter;
- 19) Luka terbuka pada pinggang bagian belakang dengan ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
- 20) Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam nol koma tujuh centimeter;
- 21) Luka terbuka pada paha kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam satu centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan mayat tersebut di atas luka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

3. Tuntutan Jaksa

Tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012, Nomor : PDM-207/PINRA/Ep/10/2011, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa I. Abraham als Rahang bin Ambo Tuo dan terdakwa II. Ishak als Haka bin Sappewali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair, sehingga pada akhir tuntutan pidananya

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Abraham als Rahang bin Ambo Tuo dan terdakwa II. Ishak als Haka bin Sappewali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Dengan Direncanakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Abraham als Rahang bin Ambo Tuo dan terdakwa II. Ishak als Haka bin Sappewali masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang ukuran kurang lebih 38 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terlilit kain putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dalam keadaan robek berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan-ketentuan undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa I. Abraham alias Rahang bin Ambo Tuo dan terdakwa II. Ishak alias Haka bin Sappewali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara untuk terdakwa I. Abraham alias Rahang bin Ambo Tuo selama 20 (dua puluh) tahun dan terdakwa II. Ishak alias Haka bin Sappewali selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang ukuran kurang lebih 38 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terlilit kain putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dalam keadaan robek berlumuran darah;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari : Kamis, Tanggal : 09 Februari 2012 yang terdiri dari: Bayu Seno MS, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati, S.H., dan Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, Tanggal : 16 Februari 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Patahuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, dengan dihadiri oleh : Adrian Paromai, S.H., St Nurdaliah dan

Johana Josephina, S.H, para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang serta para terdakwa dan penasehat hukumnya.

5. Analisis Penulis

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan terlebih dahulu;
- d. Menghilangkan nyawa orang lain;
- e. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-unsur tersebut :

- a. Barang siapa

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan

bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I. Abraham als Rahang bin Ambo Tuo dan terdakwa II. Ishak als Haka bin Sappewali adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “ dengan sengaja ” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pemarkan dan penikaman yang dilakukan oleh para terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini dapat dilihat dari pemarkan dan penikaman oleh terdakwa I dan terdakwa II dimana pemarkan dan penikaman tersebut dilakukan karena terdakwa I karena emosi pernah dikeroyok oleh Lel Ardi berteman dan pernah diludahi oleh Lel Ardi (korban) pada saat berpapasan di jalan sedangkan

terdakwa II merasa emosi karena sering diteriaki dan mau ditabrak motor oleh korban sehingga para terdakwa melampiaskan sakit hatinya. Para terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu.

Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

c. Direncanakan terlebih dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh.

Bahwa diatas telah terungkap bahwa penikaman dan pemarkan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II akibat merasa sakit hati karena terdakwa I pernah dikeroyok oleh Lel Ardi berteman dan pernah diludahi saat berpapasan di jalan, sedangkan terdakwa II sering diteriaki oleh korban dan pernah mau ditabrak motor oleh korban.

Bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunyai waktu atau kesempatan

untuk mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu terdakwa I mengambil badik yang tersimpan di kamarnya dan terdakwa II mengambil parang dari rumahnya, sehingga dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

d. Menghilangkan nyawa orang lain

Bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat, yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).

Bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa II melakukan pamarangan dengan cara mengayunkan parang yang dibawanya kepada korban A. Ardiansyah alias Ardi sebanyak satu kali sehingga mengenai lengan korban lalu membuang parang tersebut dan lari meninggalkan korban, kemudian datang terdakwa I melakukan lagi penikaman dengan cara menusukkan badik ke arah pinggang korban A. Ardiansyah alias Ardi lalu ke bagian tubuh lain korban dan lalu kemudian mengambil lagi parang milik terdakwa II lalu diayunkan lagi ke arah bagian leher korban. Dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah

nyata menunjukkan adanya gerakan dari anggota tubuh para terdakwa yaitu pada saat menggerakkan parang dan badik ke arah korban Lel Ardi, dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud;

Bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan terungkap bahwa korban Lel Ardi mengalami luka-luka sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Mattombong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Nomor : 06.445/MS/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh A. Ery Nurnawaty, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Lel Ardi mengalami beberapa luka tusukan dan pemarkan yang diakibatkan adanya benturan dengan benda tajam, luka-luka tersebutlah yang membuat korban Lel Ardi meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematian korban ini telah nyata terungkap dipersidangan.

Bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti: teori syarat *condition sine qua non* atau teori khusus, dan lain-lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah arrest Hoog Militer Gerechtshof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”.

Bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban A. Ardiansyah alias Ardi, sehingga terhadap unsur ini Penulis berpendapat telah terpenuhi.

- e. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (*deelneming*), yang oleh Pompe dikatakan bahwa “yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah korban A. Ardiansyah alias Ardi meninggal dunia akibat pemarkan dan penikaman yang dilakukan oleh para terdakwa II. Ishak alias Haka memarangi korban sebanyak satu kali dibagian tangan lalu kemudian membuang parangnya sedangkan luka lainnya dilakukan oleh terdakwa I. Abraham alias Rahang yang sebagaimana hasil Visum ditemukan sekitar 15 titik luka yang mana salah satunya mengenai leher korban yang mana dilakukan terdakwa I. Abraham alias Rahang dengan menggunakan parang milik terdakwa II. Ishak alias Haka yang dibuang didekat korban.

Bahwa fakta telah menunjukkan adanya satu orang lebih melakukan perbuatan kepada korban A. Ardiansyah alias Ardi, sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan Penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama pada perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang.

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama pada perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang.

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun

praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berlapis-lapis yakni, *primair*, melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *subsidaire*, melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih *subsidaire*, melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih *subsidaire* lagi, melanggar ketentuan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP, lebih-lebih *subsidaire* lagi, melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya maka majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan dakwaan *primair* yaitu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I. Abraham als Rahang bin Ambo Tuo dan terdakwa II. Ishak als Haka bin Sappewali adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “dengan sengaja” atau “*opzettelijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksudkan dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian bagi orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di empang tepatnya di Langnga-Lisse Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang telah terjadi penikaman dan pemarkaran terhadap korban A. Ardiansyah alias Ardi yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.00, terdakwa I. Abraham als Rahang bin Ambo Tuo bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka bin Sappewali. Pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di empang tepatnya di Langnga-

Lisse Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan/merampas nyawa orang lain yakni Ardiansyah als Ardi (korban) yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain berawal ketika terdakwa I. Abraham als Rahang bersama-sama dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha makan bebek dan meminum minuman keras jenis Ballo di rumah Andika kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang kamarnya/kampus untuk mengambil badik kemudian diselipkan dipinggangnya selanjutnya terdakwa I. Abraham als Rahang berboncengan dengan Moha pergi menjemput terdakwa II. Ishak als Haka namun mereka melihat terdakwa II. Ishak als Haka berada dipinggir jalan sehingga terdakwa I. Abraham als Rahang memanggil terdakwa II. Ishak als Haka sambil berkata “kita kesana jangan sampai ada anak kampung Beru disana” sehingga terdakwa II. Ishak als Haka kembali ke rumahnya dan mengambil parang panjang lalu diselipkan dipinggangnya kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang berboncengan tiga dengan terdakwa II. Ishak als Haka dan Moha menuju Ujung Tape dan dalam perjalanan terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “saya mau balas dendam sama anak Kampung Beru”, lalu terdakwa II. Ishak als Haka juga berkata “saya juga mau balas dendam sama Ardi anak Kampung Beru”, selanjutnya mereka sampai di Ujung Tape mereka bertemu dengan Mustakim dan tidak lama kemudian Ardi (korban) bersama-sama dengan temannya lewat di depan mereka sehingga terdakwa I. Abraham als Rahang menunjuk korban sambil berkata “itumi

yang sudah pukul saya, sudah ada”, namun terdakwa II. Ishak als H Haka berkata “saya tidak mau berkelahi kalau disini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Moha pergi naik sepeda motor Mustakim dan tidak lama kemudian korban bersama-sama dengan temannya lewat lagi di depan terdakwa I. Abraham als Rahang, terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim berboncengan ntiga juga meninggalkan tempat tersebut mengikuti korban, dan ketika terdakwa I. Abraham als Rahang bersama terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim sampai di Perbatasan Lisse-Langnga mereka bertemu korban yang sementara lari kearah mereka, namun ketika korban melihat terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim maka korban langsung berbelok dan melompat masuk ke dalam empang keringsambil berlari sehingga terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka mengejar korban kearah empang dan pada saat mengejar korban, terdakwa I. Abraham als Rahang marah karena mengingat sudah dipukul dan diludahi oleh korban, lalu pada ssat mengejar korban, terdakwa I. Abraham als Rahang terjatuh namun terdakwa II. Ishak als Haka sambil menghunuskan parang panjangnya tetap mengejar korban sampai di empang keempat korban berhenti dan duduk di dalam empang karena kelelahan, lalu datang terdakwa II. Ishak als Haka sambil membawa parang panjang dalam keadaan terhunus kemudian terdakwa II. Ishak als Haka berkata kepada korban “apa kamu

masih mau teriaki saya dan tabrak saya motor”, dan korban berkata “saya sudah tidak mau”, selanjutnya terdakwa II. Ishak als Haka langsung memarangi tangan korban sebelah kanan sehingga badik korban jatuh, setelah itu terdakwa II. Ishak als Haka membuang parang panjangnya didekat korban dan meninggalkan korban lalu datang terdakwa I. Abraham als Rahang sambil membawa badik dalam keadaan terhunus dan langsung menikam korban dengan menggunakan badik pada bagian pinggang, perut, dada korban beberapa kali atau lebih dari satu kali selanjutnya terdakwa I. Abraham als Rahang mengambil parang panjang terdakwa II. Ishak als Haka yang tergeletak di dekat korban dan langsung memarangi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali sehingga korban tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pemarkan dan penikaman yang dilakukan oleh para terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat dari pemarkan dan penikaman oleh terdakwa I dan terdakwa II dimana pemarkan dan penikaman tersebut dilakukan karena terdakwa I karena emosi pernah dikeroyok oleh Lel Ardi berteman dan pernah diludahi oleh Lel Ardi (korban) pada saat berpapasan di jalan sedangkan terdakwa II merasa emosi karena sering diteriaki dan mau ditabrak motor oleh korban sehingga para terdakwa melampiaskan sakit hatinya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I selain dikehendaki olehnya juga diketahui oleh terdakwa I bahwa akibat perbuatannya itu dapat menyebabkan orang yang terkena akan mati, hal ini dapat dilihat dari tujuan pamarangan oleh terdakwa I yakni agar korban Lel Ardi tidak melakukan perlawanan sehingga pamarangan diarahkan pada bagian pinggang, perut, dada korban beberapa kali atau lebih dari satu kali kemudian mengambil parang terdakwa II yang dipakai terdakwa II memarangi tangan korban sebanyak satu kali kemudian meninggalkan parangnya dan meninggalkan korban, parang itulah yang dipakai oleh terdakwa I untuk memarangi bagian leher korban sehingga korban tidak berdaya lagi dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “dengan sengaja”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut, arrest Hoge Raad tanggal 23-6-1937 menyatakan “hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya”, lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan “seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut;,”

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Direncanakan Terlebih Dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh;

Menimbang, bahwa diatas telah terungkap bahwa penikaman dan pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II akibat merasa sakit hati karena terdakwa I pernah dikeroyok oleh Lel Ardi berteman dan pernah diludahi saat berpapasan di jalan, sedangkan terdakwa II sering diteriaki oleh korban dan pernah mau ditabrak motor oleh korban;

Menimbang, bahwa setelah minum-minum ballo dan makan bebek di rumah Andika kemudian terdakwa I dan terdakwa II masing-masing pulang ke rumah, terdakwa I pulang dengan Moha dan ketika sampai di rumahnya terdakwa I. Abraham als Rahang makan lagi dan setelah itu terdakwa I masuk ke dalam kamarnya/kampus untuk mengambil badik

kemudian diselipkan dipinggangnya selanjutnya terdakwa I. Abraham als Rahang berboncengan dengan Moha pergi menjemput terdakwa II. Ishak als Haka berada dipinggir jalan sehingga terdakwa I. Abraham als Rahang memanggil terdakwa II. Ishak als Haka sambil berkata “kita kesana jangan sampai ada anak Kampung Beru disana” sehingga terdakwa II. Ishak als Haka kemabali kerumahnya mengambil parang panjang lalu diselipkan dipinggangnya, kemudian terdakwa I Abraham als Rahang berboncengan tiga dengan terdakwa II. Ishak als Haka serta Moha menuju Ujung Tape dan dalam perjalanan terdakwa I. Abraham als Rahang berkata “saya mau balas dendam sama anak Kampung Beru”, lalu terdakwa II. Ishak als Haka juga berkata “saya juga mau balas dendam sama Ardi anak Kampung Beru”, selanjutnya mereka sampai di Ujung Tape, mereka bertemu dengan Mustakim dan tidak lama kemudian Ardi (korban) bersama-sama dengan temannya lewat di depan mereka sehingga terdakwa I. Abraham als Rahang menunjuk korban sambil berkata “itumi yang sudah pukul saya dulu, sudah ada”, namun terdakwa II. Ishak als Haka berkata “saya tidak mau berkelahi kalau disini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Moha pergi naik sepeda motor Mustakim dan tidak lama kemudian korban bersama-sama dengan temannya lewat lagi di depan terdakwa I. Abraham als Rahang, terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim, kemudian terdakwa I. Abraham als Rahang bersama terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim berboncengan tiga juga meninggalkan tempat tersebut mengikuti korban,

dan ketika terdakwa I. Abraham als Rahang bersama terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim sampai di perbatasan Lisse-Langnga mereka bertemu dengan korban yang sementara berlari ke arah mereka namun ketika korban melihat terdakwa I. Abraham als Rahang bersama terdakwa II. Ishak als Haka serta Mustakim maka korban langsung berbelok dan melompat masuk ke dalam empang sambil berlari sehingga terdakwa I. Abraham als Rahang dan terdakwa II. Ishak als Haka mengejar korban ke arah empang, dan pada saat mengejar korban terdakwa I. Abraham als Rahang marah karena mengingat sudah dipukul dan diludahi oleh korban, lalu pada saat mengejar korban, terdakwa I. Abraham als Rahang terjatuh namun terdakwa II. Ishak als Haka sambil menghunuskan parang panjangnya tetap mengejar korban sampai di empang keempat korban berhenti dan duduk di dalam empang karena kelelahan lalu datang terdakwa II. Ishak als Haka sambil membawa parang panjang dan dalam keadaan terhunus kemudian terdakwa II. Ishak als Haka berkata kepada korban “apa kamu masih mau teriaki saya dan tabrak saya motor”, dan korban berkata “saya sudah tidak mau”, selanjutnya terdakwa II. Ishak langsung memarangi tangan korban sebelah kanan sehingga badik korban jatuh, setelah itu terdakwa II. Ishak als Haka membuang parang panjangnya di dekat korban dan meninggalkan korban lalu datang terdakwa I. Abraham als Rahang sambil membawa badik dalam keadaan terhunus dan langsung menikam korban dengan menggunakan badik dan pada bagian pinggang, perut dan dada korban beberapa kali atau lebih

dari satu kali selanjutnya terdakwa I. Abraham als Rahang mengambil parang panjang terdakwa II. Ishak als Haka yang tergeletak di dekat korban dan langsung memarangi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali sehingga korban tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengejaran dengan jarak yang lumayan jauh para terdakwa memiliki waktu untuk berfikir dan menimbang-nimbang perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu setidaknya tidaknya menuju ke tempat korban sekaligus juga tidak terlihat bahwa pemarkaran dan penikaman yang dilakukan para terdakwa bukanlah reaksi spontan akan tetapi dendam/sakit hati terhadap perbuatan korban kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu terdakwa I mengambil badik yang tersimpan di kamarnya dan terdakwa II mengambil parang dari rumahnya, sehingga dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat, yakni

pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa II melakukan pemarkaran dengan cara mengayunkan parang yang dibawanya kepada korban A. Ardiansyah alias Ardi sebanyak satu kali sehingga mengenai lengan korban lalu membuang parang tersebut dan lari meninggalkan korban, kemudian datang terdakwa I melakukan lagi penikaman dengan cara menusukkan badik ke arah pinggang korban A. Ardiansyah alias Ardi lalu ke bagian tubuh lain korban dan lalu kemudian mengambil lagi parang milik terdakwa II lalu diayunkan lagi ke arah bagian leher korban. Dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah nyata menunjukkan adanya gerakan dari anggota tubuh para terdakwa yaitu pada saat menggerakkan parang dan badik ke arah korban Lel Ardi, dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan terungkap bahwa korban Lel Ardi mengalami luka-luka sehinggal mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Mattombong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Nomor : 06.445/MS/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani

oleh A. Ery Nurnawaty, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Lel Ardi mengalami beberapa luka tusukan dan pemarkan yang diakibatkan adanya benturan dengan benda tajam, luka-luka tersebutlah yang membuat korban Lel Ardi meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematian korban ini telah nyata terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti: teori syarat *condition sine qua non* atau teori khusus, dan lain-lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah arrest Hoog Militer Gerechtshof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban A. Ardiansyah alias Ardi, sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (*deelneming*), yang oleh Pompe dikatakan bahwa “yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan”;

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam kaitannya dengan penyertaan (*deelneming*), dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang mana pelaku-pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah korban A. Ardiansyah alias Ardi meninggal dunia akibat pemarkan dan penikaman yang dilakukan oleh para terdakwa II. Ishak alias Haka memarangi korban sebanyak satu kali dibagian tangan lalu kemudian membuang parangnya sedangkan luka lainnya dilakukan oleh terdakwa I. Abraham alias Rahang yang sebagaimana hasil Visum ditemukan sekitar 15 titik luka yang mana salah satunya mengenai leher korban yang mana dilakukan terdakwa I. Abraham alias Rahang dengan menggunakan parang milik terdakwa II. Ishak alias Haka yang dibuang didekat korban;

Menimbang, bahwa fakta telah menunjukkan adanya satu orang lebih melakukan perbuatan kepada korban A. Ardiansyah alias Ardi, sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tidaklah terbukti melakukan pembunuhan berencana melainkan hanya pembunuhan biasa yang dikarenakan sakit hati atas perbuatan korban, majelis hakim tidaklah sependapat dengan pembelaan penasehat hukum para terdakwa, pertimbangan unsur berencana telah diuraikan dengan

jelas diatas pada pertimbangan unsur sehingga majelis mengambil alih seluruh pertimbangan diatas, oleh karenanya pembelaan penasehat hukum para terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan kesatu subsidair, lebih subsidair lagi dan lebih-lebih subsidair lagi dengan sendirinya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapa dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri para

terdakwa, baik secara pemaaf maupun membenar, oleh karena itu kepada diri para terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan para terdakwa telah mendatangkan duka yang begitu mendalam pada keluarga korban A. Ardiansyah alias Ardi, yang dalam hal ini tidak dapat ditukar atau diganti dengan apapun juga;
- Perbuatan terdakwa I tergolong sadis karena selain melakukan penikaman terhadap korban yang sudah tidak berdaya terdakwa I mengambil lagi parang milik terdakwa II dan mengayunkan ke bagian leher korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama ini ditahan dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan para terdakwa dari para tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan ketentuan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan no. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Tetapi, di dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa, Penulis kurang sependapat dengan *vonis* Majelis Hakim yang memberikan hukuman penjara masing-masing untuk *terdakwa* I selama 20 tahun dan terdakwa II selama 17 tahun. Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Penulis lebih setuju terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa I dianggap terlalu sadis yang setelah menikam korban yang tidak berdaya, terdakwa I juga memarangi leher korban. Intinya menurut Penulis hukuman untuk terdakwa II sudah sesuai tetapi seharusnya hukuman untuk terdakwa I bisa lebih berat lagi menurut Penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5 (lima) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire Lagi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Lebih-Lebih Subsidaire Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang

digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus

lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adam. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- _____. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- _____. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- _____. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Hamzah, Andi. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar grafika
- Solahuddin. 2008. *KUHP, KUHP dan KUHPdt*. Jakarta: Visimedia
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana & Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika



PENGADILAN NEGERI PINRANG

Jl. Jenderal Sukowati No. 38 Tlp. 0421-921030

PINRANG 91212

Nomor : 02 / Pen.Pid / 2013 / PN.Pinrang

Pinrang, 28 Januari 2013

Lampiran : -

Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Saudara tertanggal, 15 Januari 2013, Nomor : 424/UN4.6.3/PL.02/2013 ,perihal seperti tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami sampaikan bahwa saudara :

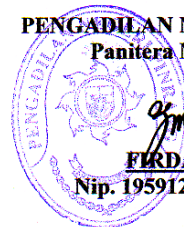
N a m a : **ANDI DEDY HERFIWAN**
Nomor Pokok : B11109473
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama Sama**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 28 Januari Januari 2013 s/d 30 Januari 2013 , untuk mendapatkan data sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 212 /Pid/B/2011/PN.Pinrang.)**".

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PENGADILAN NEGERI PINRANG

Panitera Muda Pidana



FIRDAUS, S.H

Nip. 195912111985031004